

**PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM  
PENANGGULANGAN DAMPAK PASCA BENCANA  
GEMPA BUMI 30 SEPTEMBER 2009**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**Oleh**

**SORAYA OKTARINA**  
**06193045**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2010**

## ABSTRAK

**SORAYA OKTARINA, 06193045, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang. Dengan judul skripsi: Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Penanggulangan Dampak Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 Di Kota Padang. Dibimbing oleh; Drs. Alfan Miko, M.Si dan Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 92 halaman dengan referensi 5 Buku teori, 6 Metode, 1 Jurnal, 2 skripsi, 5 Situs Internet.**

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang peran Pemerintah Kota Padang dalam menanggulangi dampak bencana gempa bumi yang terjadi di Kota Padang tanggal 30 September 2009. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah keadaan Kota Padang yang masih belum pulih seratus persen akibat besarnya dampak yang timbul akibat bencana gempa bumi 30 September 2009 yang lalu, disamping itu masih terdapat beberapa masalah seputar penanggulangan dampak bencana gempa bumi yang masih harus dibicarakan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data yang menyatakan bahwa masih terdapatnya dampak-dampak kerusakan baik itu berupa kerusakan bangunan, ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini mengacu pada konsep peran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Padang dalam melakukan penanggulangan dampak bencana gempa bumi 30 September 2009 telah berusaha semaksimal mungkin, dengan membuat berbagai kebijakan-kebijakan dan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengurus dan menangani masalah penanggulangan dampak bencana gempa bumi. Dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana, BPBD melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti : SKP terkait, NGO, dan lain sebagainya. Adapun mengingat baru dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana di Kota Padang, maka dalam hal operasional, teknis, sarana dan prasarananya masih terbatas, hal ini yang menjadi kendala bagi BPBD dalam melaksanakan tugasnya sehingga sering menimbulkan pendapat yang miring dikalangan masyarakat.

**Kata kunci:** *Peran Pemerintah Kota Padang, gempa bumi 30 September 2009 di Kota Padang, Manajemen Penanggulangan Bencana.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bencana adalah gangguan serius dari berfungsinya suatu masyarakat, yang menyebabkan kerugian-kerugian yang besar terhadap lingkungan, material dan manusia, yang melebihi kemampuan dari masyarakat yang tertimpa bencana untuk menanggulangi dengan hanya menggunakan sumber daya masyarakat itu sendiri. Bencana sering diklasifikasikan sesuai dengan cepatnya serangan bencana tersebut (secara tiba-tiba atau perlahan-lahan), atau sesuai dengan penyebab bencana itu (secara alami atau ulah manusia)<sup>1</sup>. Bencana dapat berupa (1) fenomena alam seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, topan badai, kebakaran karena alam (gunung meletus, kebakaran hutan musim kemarau, api gambut abadi, fokus sinar matahari oleh potongan beling disemak belukar); (2) akibat kelalaian manusia seperti kebocoran *nuclear plant* atau pipa gas, kebakaran karena kelalaian, tumpahan minyak di laut yang tak disengaja, arus pendek listrik, penyebaran virus dan (3) kejahatan seperti sabotase, pembakaran, peledakan, penyebaran virus dan perusakan fisik aset.

Indonesia merupakan Negara yang sangat rawan bencana. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya berbagai bencana yang melanda berbagai wilayah secara terus menerus, baik yang disebabkan oleh faktor alam (gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, tanah longsor, angin ribut, dll), maupun oleh faktor non alam seperti berbagai akibat kegagalan teknologi dan ulah manusia.

---

<sup>1</sup> Bencana, *Disaster Recovery Planning: Manajemen bencana Dan Akuntansi* pada website [www.KSAP.com](http://www.KSAP.com) di akses pada tanggal 30 Desember 2009.

Umumnya bencana yang terjadi tersebut mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat, baik berupa korban jiwa manusia kerugian harta benda, maupun kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Sebagai sebuah Negara, Negara Republik Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya sendiri dari bencana, oleh karena itu Negara Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB)<sup>2</sup>. Undang-undang ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada kehidupan dan penghidupan yang ada di negara Republik Indonesia dari bencana dengan cara menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.

Upaya penanggulangan bencana membutuhkan suatu organisasi khusus untuk mengelola pelaksanaannya. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga telah mensyaratkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi terkena bencana. BPBD merupakan organisasi resmi pemerintah untuk menggantikan peran SATKORLAK/SATLAK PB yang bersifat koordinatif dan fungsional. Koordinatif adalah penyatuan langkah-langkah kegiatan yang termuat dalam tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang berbeda tetapi saling berhubungan satu sama lain untuk pencapaian tujuan organisasi<sup>3</sup>, sedangkan fungsional yaitu mempunyai fungsi yang sangat berarti dan penting ketika terjadi sebuah bencana.

---

<sup>2</sup> Politik Bumi dan Manajemen Bencana dalam "Jurnal Dialog Kebijakan Publik" edisi 1/ Juni/ Tahun II/ 2008.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan peran Pemerintah Kota Padang dimana yang dibebani tugas yakni Badan Penanggulangan Bencana dalam menanggulangi dampak bencana gempa bumi 30 September 2009 di Kota Padang. Penanggulangan bencana yang dilakukan di Kota Padang merupakan langkah atau prosedur- prosedur yang dilakukan dalam menangani ketika bencana terjadi, baik sebelum, saat ataupun sesudah bencana itu terjadi. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada pemerintah Kota Padang tentang bagaimana peran yang dilakukannya dalam menanggulangi dampak bencana gempa bumi 30 September 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang dalam melakukan penanggulangan dampak bencana gempa bumi 30 September 2009 telah berusaha semaksimal mungkin, dengan membuat berbagai kebijakan- kebijakan dan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengurus dan menangani masalah ini.
2. BPBD merupakan badan yang dibentuk dan dibebani tugas menanggulangi masalah bencana dengan instruksi dan komando dari pimpinan.
3. Pada saat tanggap darurat, BPBD membuat program reaksi cepat yang meliputi penanganan korban, evakuasi, pemberian bantuan, penyediaan logistik dan lain-lain. Dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD bersama-sama dengan SKPD yang terdapat di lingkungan pemerintah merancang pokok-pokok kebijakan rehab-rekon.

## DAFTAR PUSTAKA

### buku- buku

- Afrizal, 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Laboratorium Sosiologi FISIP Unand, Padang.
- Burhan Bungin, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualiasasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Dimock, Dimock. Fox. 1996. *Administrasi Negara*. Jakarta. Erlangga
- Doyle Paul Johnson. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta. Gramedia
- GeorgeRitzer, Douglas J.Gednan. 2005. *Teori Sosiologi Modern* Jakarta . Kencana
- Handayani, NurFitri. 2004. *Manajemen bencana dalam penanganan korban gempa bumi tanggal 6 february 2004 di kabupaten nabire* (Tesis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2). Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara
- Jurnal Dialog Kebijakan Publik Edisi 1 / Juni / Tahun II / 2008//Politik Bumi dan Manajemen Bencana
- Lexy Moleong, 1997. *Metode Penelitian Kualitatif.*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, 1988. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung,
- Muktaf, haifani akhmad . *Manajemen resiko bencana gempa bumi* (studi kasus gempabumi yogyakarta 27 mei 2006). Seminar Nasional Iv Sdm Teknologi Nuklir Yogyakarta, 25-26 AGUSTUS 2008
- Ridwan. 2003. **Dasar dasar statistika**. Bandung.